

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl.Ir. H Juanda (Komplek Perkantoran) Tasikmalaya



LAPORAN KINERJA
INTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini, disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud penyusunan LKIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf dan bersedia menerima semua kritik maupun saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Disamping itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tasikmalaya, Februari 2019
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya

TTD

H. M. Firmansyah. SH MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk melaksanakan mandat ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada suatu instansi pemerintah. Dimana akuntabilitas dimaksud adalah merupakan suatu perwujudan kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sebagai suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik sangat bermanfaat untuk:

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- c. Peningkatan perencanaan di segala bidang baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
- d. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;

- f. Mendorong instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- u. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
- w. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Kewenangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dari 32 Urusan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan dari 6 Urusan Pilihan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang merupakan bidang kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Pilihan Perdagangan.

E. Struktur Organisasi

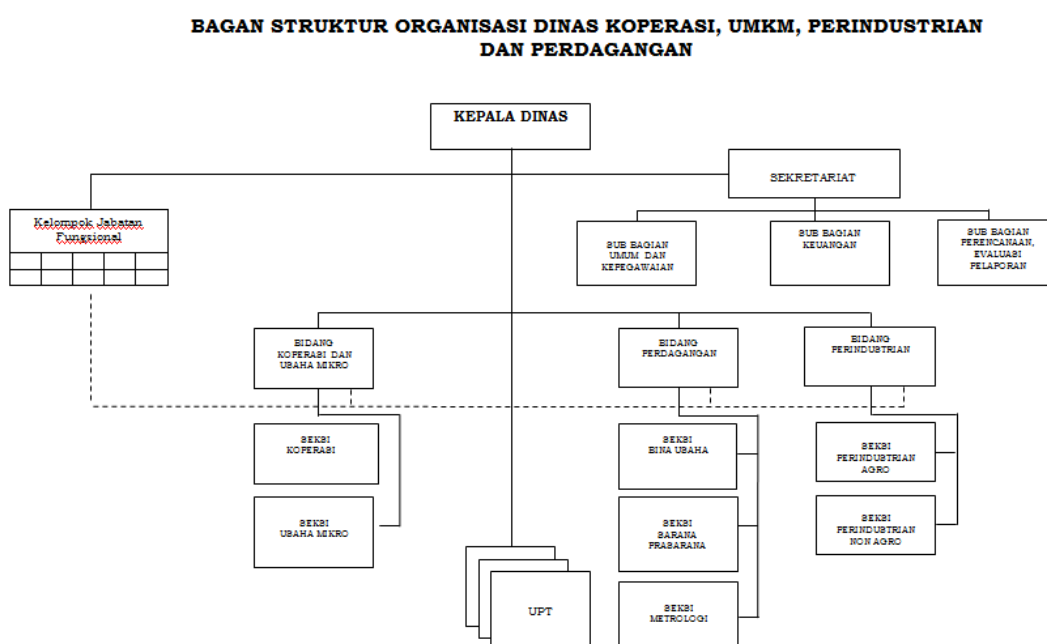
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 1. Seksi Koperasi

2. Seksi Usaha Mikro
- d. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Perindustrian Agro
 2. Seksi Perindustrian Non Agro
- e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Bina Usaha
 3. Seksi Metrologi
- f. UPTD Metrologi Legal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya



Untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, pada saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya memiliki pegawai sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai sebanyak 55 orang, terdiri dari:
 1. PNS : 53 orang
 2. CPNS : - orang
 3. Tenaga Kontrak : 2 orang
- b. Pendidikan:
 1. PNS:
 - SD : - orang
 - SLTP : - orang

- SLTA : 16 orang
- D3 : - orang
- S1 : 31 orang
- S2 : 6 orang
- 2. CPNS:
 - SLTA : - orang
 - S1 : - orang
- 3. Tenaga Kontrak:
 - SD : - orang
 - SLTP : - orang
 - SLTA : - orang
 - S1 : 2 orang
- c. Golongan (PNS dan CPNS):
 1. Golongan I : - orang
 2. Golongan II : 9 orang
 3. Golongan III : 34 orang
 4. Golongan IV : 10 orang
- d. Jabatan Struktural:
 1. Eselon II : 1 orang
 2. Eselon III : 4 orang
 3. Eselon IV : 10 orang
- e. Jabatan Fungsional:
 1. Penyuluh Perindag Madya : 2 orang
 2. Penyuluh Perindag Penyelia : - orang
 3. Penyuluh Perindag Muda : 6 orang
 4. Penyuluh Perindag Pertama : - orang
 5. Penyuluh Perindag Pelaksana : - orang
 6. Penera Madya : 2 orang
 7. Penera Penyelia : 3 orang
 8. Penera Muda : 1 orang

F. Sistematika Laporan

LKIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
D. Bidang Kewenangan
E. Struktur Organisasi
F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
B. Langkah Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

1. Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah:

Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Visi Kota Tasikmalaya yaitu :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

PENJELASAN VISI :

Religius dengan pengertian suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan

keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai pejabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka dirumuskan misi dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing; dan
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik profesional dan akuntabel

Misi **Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing** adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi local, membangun sarana prasarana (infrastruktur) koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan, membuka investasi dan lapangan kerja serta

kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, perluasan pasar serta peningkatan mutu.

Misi **Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik profesional dan akuntabel** adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang jujur, baik, bersih dan amanah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta senantiasa menjalankan tugas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing

Mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro

Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas

Sasaran 4 : Meningkatnya pertumbuhan industri

Sasaran 5 : Meingkatkan distribusi usaha Perdagangan dan Metrologi legal

Sasaran 6 : Meningkatnya jumlah wirausaha baru

Misi 2 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik profesional dan akuntabel

Mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

4. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Untuk pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk kebijakan dan program serta kegiatan teknis yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kebijakan, Program dan Kegiatan

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Penilaian Kesehatan Koperasi 2. Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya 3. Pendampingan Revitalisasi Koperasi
2. menyediakan dukungan bagi peningkatan akses usaha mikro ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pemasaran	2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	4. Intermediasi Pelaku Usaha Mikro Dengan Lembaga Keuangan 5. Diseminasi Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil 6. Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Usaha Mikro 7. Pengembangan kerjasam kemitraan
3. pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat miskin dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM	3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan 9. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017) 10. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri
4. pencetakan wirausaha baru	4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	11. Penyelenggaraan Sertifikat Halal 12. Penyelenggaraan Pelatihan

		<p>Kewirausahaan Sektor Home Industri</p> <p>13. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan</p>
<p>5. menyediakan dukungan bagi peningkatan akses industri ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produk</p>	<p>5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p>	<p>14. Penyelenggaraan Sertifikat Halal</p> <p>15. Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya</p> <p>16. Pembinaan Usaha Mikro makanan Olahan</p> <p>17. Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan</p> <p>18. Pelatihan Teknik Produksi IKM Konveksi</p> <p>19. Pelatihan Teknik Produksi IKM Percetakan</p> <p>20. Pelatihan Teknik Produksi IKM Bordir</p> <p>21. Pelatihan Teknik Produksi IKM Batik</p> <p>22. Pelatihan Teknik Produksi IKM Kayu Olahan</p>
	<p>6. Program Penataan Struktur Industri</p>	<p>23. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya</p>
	<p>7. Program pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</p>	<p>24. Rehabilitasi / Pemeliharaan Panggung Reklame Kerajinan Tradisional Kota Tasikmalaya</p> <p>25. Revitalisasi Sentra IKM Produk Unggulan Kota Tasikmalaya (DAK - Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah</p>
<p>6. Menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan tera tera ulang</p>	<p>8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p>	<p>26. Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat</p> <p>27. Pengawasan Metrologi Legal</p> <p>28. Pengelolaan Standar Ukuran dan</p>

		<p>Laboratorium Kemetrolgian</p> <p>29. Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal</p> <p>30. Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang</p> <p>31. Sosialisasi Metrologi Legal</p> <p>32. Pembentukan Daerah Tertib Ukur</p>
7. menyediakan dukungan bagi peningkatan akses perdagangan ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar	9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<p>33. Penyelenggaraan Promosi Melalui Event-Event Pameran</p> <p>34. Pelatihan Teknik Perbengkelan</p> <p>35. Pelatihan Usaha Jasa Service Elektronik</p> <p>36. Pameran Tasik Kreatif</p> <p>37. Penyusunan Fesibility Study Pengadaan Lahan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk UMKM</p>
	10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	38. Pembinaan Pedagang Kaki Lima
	11. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar	<p>39. Penataan Pasar Rakyat (DAK SILPA 2015/2016)</p> <p>40. Penyusunan DED Pasar Rakyat (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017)</p> <p>41. DAK - Reguler Bidang Pasar (Dana Alokasi Khusus Tahun 2018)</p> <p>42. DAK - Penugasan Bidang Pasar (Dana Alokasi Khusus Tahun 2018)</p> <p>43. Pengembangan Sarana Metrologi Legal (DAK - Reguler Bidang Pasar)</p> <p>44. Revitalisasi Pasar Rakyat Indihiang (DAK - Penugasan Bidang Pasar)</p> <p>45. Revitalisasi Pasar</p>

		Rakyat Cibuti (DAK - Penugasan Bidang Pasar) 46. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Rakyat
8. menyediakan dukungan bagi peningkatan nilai ekspor	12. Menyediakan dukungan bagi peningkatan nilai ekspor	47. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
9. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas pelayanan	13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 50. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 52. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 53. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 54. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 56. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60. Penyediaan Makanan dan Minuman 61. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 62. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

		63. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
	14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64. Pengadaan Mobil Jabatan 65. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 66. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 67. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 68. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 71. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
10. Peningkatan ketepatan waktu dan akurasi data melalui optimalisasi penggunaan aplikasi	17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 76. Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran 77. Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
	19. Program Perencanaan Kerja	78. Penyusunan Rencana Kerja 79. Penyusunan Rencana Strategis
		80. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

		Sektoral Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 81. Sinegritas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
--	--	---

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang biasa disingkat Renja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Rencana Kinerja

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang :

- Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Tahun 2018;
- Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
- Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Adapun komponen kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana yang akan diwujudkan pada Tahun 2018 beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja pada RKT

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah masing-masing.

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 pada

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta fokus layanan urusan pilihan Perdagangan dan urusan pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Koperasi :

- 1) Prosentase koperasi sehat (%)
- 2) Persentase usaha mikro yang bersertifikat (%)
- 3) Jumlah Koperasi yang dibina (buah)
- 4) Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha (buah)
- 5) Persentase Wirausaha baru yang dibina (%)
- 6) Persentase Wirauasha baru yang dibina (%)

Urusan Pilihan Perdagangan :

- 1) Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik (%)
- 2) Jumlah wirausaha baru sector perindustrian dan perdagangan yang dibina (orang)
- 3) Jumlah Masyarakat miskin sector perindustrian dan perdagangan yang divina (orang)
- 4) Nilai Ekspor bersih
- 5) Persentase peningkatan omset pelaku usaha
- 6) Persentase alat UTTP yang bertera sah
- 7) Persentase Pelaku usaha yang dibina
- 8) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
- 9) Persentase Pasar yang dibina

Urusan Pilihan Perindustrian :

- 1) Persentase pertumbuhan industri (%)
- 2) Jumlah sentra IKM yang dikembangkan (buah)

indikator kinerja utama tersebut ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dan setiap tahunnya dilaporkan pencapaian targetnya pada LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan juga LKPJ Walikota Tasikmalaya melalui Bidang Pemerintahan BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya. Untuk target Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 IKU (KPI) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2018	Sumber Data
1	Persentase koperasi sehat	2	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	2	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
3	Jumlah Koperasi yang dibina	100	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
4	Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha	500	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
5	Persentase wirausaha baru yang dibina	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
6	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
7	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	100	Bidang Perdagangan
8	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	400	Bidang Perdagangan
9	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	450	Bidang Perdagangan
10	Nilai ekspor bersih	38000000	Bidang Perdagangan
11	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	2	Bidang Perdagangan
12	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	5	Bidang Perdagangan
13	Persentase alat UTTP yang bertera sah	50	Bidang Perdagangan
14	Persentase Pelaku usaha yang dibina	100	Bidang Perdagangan
15	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	100	Bidang Perdagangan
16	Persentase Pasar yang dibina	100	Bidang Perdagangan
17	Persentase pertumbuhan industri	2	Bidang Perindustrian
18	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	4	Bidang Perindustrian

Namun demikian, indikator tersebut bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan lingkup koperasi, perindustrian dan perdagangan. Masih terdapat indikator-indikator lain yaitu indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan.

Indikator kinerja sasaran merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja sasaran yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya.

Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/ kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan ke dalam kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

- Masukan (*Input*)
Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- Keluaran (*Output*)
Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Hasil (*Outcome*)
Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Manfaat (*Benefit*)
Adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Dampak (*Impact*)
Adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

- (1) Spesifik dan jelas;
- (2) Dapat diukur secara obyektif;
- (3) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan
- (4) Tidak bias.

Adapun RKT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2018) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	1 Persentase koperasi sehat	%	2
2	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas	2 Persentase usaha mikro bersertifikat	%	2
3	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	3 Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	400
4	Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan	4 Jumlah masyarakat sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450
5	Meningkatnya pertumbuhan industri	5 Persentase pertumbuhan industri	%	2
6	Meningkatnya distribusi usaha perdagangan dan metrologi legal	6 Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5
		7 Nilai ekspor bersih	US\$ Juta	38
		8 Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	50
7	meningkatkan kualitas pelayanan	9 Capaian IKM perangkat daerah	Angka	78

	perangkat daerah				
C.	8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Angka 75

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diberlakukan sejak tanggal 20 November 2014, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pada Lampiran I huruf C Pimpinan Perangkat Daerah merupakan salah satu pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja di tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota disusun oleh pimpinan Perangkat daerah kemudian ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dan pimpinan Perangkat daerah/ unit kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang sudah dilaporkan capaiannya pada dokumen LAKIP tahun 2017 silam. Dan untuk capaian dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersama-sama Walikota Tasikmalaya akan disampaikan pada Dokumen LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini.

Penetapan kinerja Tahun 2018 merupakan tekad dan janji rencana kinerja Tahun 2018 yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Walikota Tasikmalaya, yang bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	%	2
	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas	Persentase usaha mikro bersertifikat	%	2
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	orang	400
	Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah masyarakat sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450
2	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	%	2
3	Meningkatnya distribusi usaha perdagangan dan metrologi legal	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5
4		Nilai ekspor bersih	US\$ Juta	38
		Persentase alat UJTP yang berterasa	%	50
5	meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	Angka	78
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Angka	75

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.217.774.000	
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.154.972.700	
3 Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 61.480.000	
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 128.160.000	
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Rp 40.000.000	
6 Perencanaan Kerja	Rp 20.000.000	
7 peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp 50.000.000	
8 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Rp 2.034.250.000	
9 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Rp 1.996.000.000	
10 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 410.000.000	
11 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 554.763.300	
12 peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp 55.000.000	
13 Program penataan struktur industri	Rp 100.000.000	
14 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 100.000.000	
15 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar	Rp 3.874.697.000	
16 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 2.157.500.000	
17 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Rp 7.080.000.000	
18 Program Fasilitas Pengadaan Tanah Pemerintah	Rp 20.000.000.000	
19 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Rp 2.502.382.600	
20 Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 115.000.000	
	Rp 43.651.979.600	

Walikota Tasikmalaya

ttd
H. BUDI BUDIMAN

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

ttd
H. M. FIRMANSYAH SH. MH
NIP. 19620418 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**SEKRETARIAT
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%
3	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan	Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%
4	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7 dokumen
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Tersusunnya perencanaan kerja Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Tersedianya dokumen monev program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,217,774,000	
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,154,972,700	
3 Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 61,480,000	
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 128,160,000	
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40,000,000	
6 Perencanaan Kerja	Rp 20,000,000	
7 Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 115,000,000	
	Rp 2,737,386,700	

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. M. Firmansyah. SH. MH
NIP. 19620418 198903 1 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Sekretaris Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Dra. Euis Carliati
NIP. 19641001 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
		Waktu penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
		Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	100%
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	100%
		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	100%
		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	100%
		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%
		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%
		Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%
		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	100%
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (mamin harian, mamin rapat, mamin tamu, mamin kegiatan)	100%
		Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	100%
Waktu Penyediaan jasa keamanan dan ketertiban kantor	100%		
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai	100%		
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%
		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	100%
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	100%
		Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%
		Tersedianya jasa prasarana aparatur	100%
		Tersedianya jasa prasarana aparatur	100%
3	Tingkat kepatuhan aparatur	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100%
4	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan Barang semesteran	2 Dokumen
		Jumlah laporan Barang akhir tahun	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 8,040,000	
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 134,000,000	
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4,250,000	

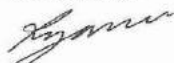
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp	50,000,000
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	36,400,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	182,458,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	80,000,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	55,600,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	12,446,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	72,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	8,550,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	25,400,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	63,000,000
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	290,030,000
14	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Rp	165,600,000
15	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Rp	30,000,000
16	Pengadaan Mobil Jabatan	Rp	540,000,000
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	39,500,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	40,000,000
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp	124,285,000
20	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	232,000,000
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	42,529,000
22	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Rp	63,500,000
23	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	73,158,700
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp	61,480,000
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	128,160,000
26	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Rp	10,000,000
27	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Rp	5,000,000
		Rp	2,577,386,700

Sekretaris Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



Dra. EUIS CARLIATI
NIP. 19641001 199003 2 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasubag Umum dan Kopogawaiari
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



RIANI MUKIM, S.IP, M.SI
NIP. 19740820 200604 2 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen
2	Tersusunnya perencanaan kerja	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun Jumlah rencana strategis yang disusun	1 dokumen 1 dokumen
3	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral Dinas KUMKM Perindag	1 dokumen
		Tersedianya dokumen monev program dan kegiatan Dinas KUMKM Perindag	4 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10.000.000	
2 Penyusunan Rencana Kerja	Rp 10.000.000	
3 Penyusunan Rencana Strategis	Rp 10.000.000	
4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 35.000.000	
5 Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 80.000.000	
	Rp 145.000.000	

Sekretaris Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Dra. EUIS CARLIATI
NIP. 19641001 199003 2 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


IRVAN HUSEIN KUSUMAH, Sos, MSI
NIP. 19820202 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASUBAG KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen 1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 10,000,000	
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5,000,000	
	Rp 15,000,000	

Sekretaris Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Dra. EUIS CARLIATI

NIP. 19641001 199003 2 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasubag Keuangan Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


DADAN, SE

NIP. 19710729 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASUBAG KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen 1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 10.000.000	
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.000.000	
	Rp 15.000.000	

Sekretaris Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Dra. EUIS CARLIATI

NIP. 19641001 199003 2 010

Tasikmalaya, 13 Juli 2018
Kasubag Keuangan Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


DEDE MARLIAN, S.Sos


NIP. 19721005 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIDANG UMKM DAN INDUSTRI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaku usaha industri dan perdagangan	Persentase IKM yang dibina	8 unit
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase realisasi rencana pembangunan Industri Kota Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan	490 orang 10% 3 unit 0.25%

Program		Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	1,104,250,000	
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	2,157,500,000	
3 Program Penataan Struktur Industri	Rp	100,000,000	
4 Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Rp	7,080,000,000	
5 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Rp	1,500,000,000	
	Rp	11,941,750,000	

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. M. Firmansyah. SH. MH
 NIP. 19620418 198903 1 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kepala Bidang UMKM dan Industri,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Drs. MAMAN DURMAN
 NIP. 19600325 198303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**BIDANG UMKM DAN INDUSTRI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaku usaha industri dan perdagangan	Persentase IKM yang dibina	8 unit
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase realisasi rencana pembangunan Industri Kota Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan	490 orang 10% 3 unit 0.25%


Program	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 1,104,250,000	
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 2,157,500,000	
3 Program Penataan Struktur Industri	Rp 100,000,000	
4 Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Rp 7,080,000,000	
5 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Rp 1,500,000,000	
	Rp 11,941,750,000	

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. M. Firmansyah, SH. MH
NIP. 19620418 198903 1 010

Tasikmalaya, 1 April 2018
PIT. Kepala Bidang UMKM dan Industri,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



Dra. EUIS CARLIATI
NIP. 19641001 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**BIDANG UMKM DAN INDUSTRI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaku usaha industri dan perdagangan	Persentase IKM yang dibina	8 unit
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase realisasi rencana pembangunan Industri Kota Persentase sentra IKM yang dikembangkan Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan	490 orang 10% 3 unit 0.25%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 1,104,250,000	
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 2,157,500,000	
3 Program Penataan Struktur Industri	Rp 100,000,000	
4 Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Rp 7,080,000,000	
5 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Rp 1,500,000,000	
	Rp 11,941,750,000	

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. M. Firmansyah, SH. MH
NIP. 19620418 198903 1 010

Tasikmalaya, 13 Juli 2018
Kepala Bidang UMKM dan Industri,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


AI USMAN
NIP. 19610407 198403 1 004

No	Sasaran Pr
(1)	(2)
1	Persentase Jumlah V industri dan perdag
2	Persentase IKM berli

- 1 Penyelenggaraan p Sektor Home indust
- 2 Pelatihan Teknik Pr
- 3 Pelatihan Teknik Pr
- 4 Pelatihan Teknik Pr
- 5 Pelatihan Teknik Pr
- 6 Pelatihan Teknik Pr
- 7 Pemberdayaan Eko Berbasis Komunitas

Kepala Bidang
Dinas Koperasi,
Menengah, I
Perdagangan

Drs. MA
NIP. 19600

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI UMKM DAN INDUSTRI NON AGRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Jumlah Wirausaha baru bidang industri dan perdagangan	Persentase UMKM yang dibina	100%
2	Persentase IKM berkualitas	Persentase IKM yang dibina	100%

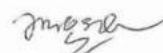
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri	Rp 930.000.000	
2 Pelatihan Teknik Produksi IKM Konveksi	Rp 320.000.000	
3 Pelatihan Teknik Produksi IKM Percetakan	Rp 150.000.000	
4 Pelatihan Teknik Produksi IKM Bordir	Rp 92.000.000	
5 Pelatihan Teknik Produksi IKM Batik	Rp 137.500.000	
6 Pelatihan Teknik Produksi IKM Kayu Olahan	Rp 180.000.000	
7 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri	Rp 1.500.000.000	
	Rp 3.309.500.000	

Kepala Bidang UMKM dan Industri,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Tasikmalaya



AI USMAN
NIP. 19610407 198403 1 004

Tasikmalaya, 13 Juli 2018
Kasi UMKM dan Industri Non Agro,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



ELI ANINGSIH, S.Sos
NIP. 19650524 198703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI UMKM DAN INDUSTRI AGRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase IKM yang dibina	100%

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Sertifikat Halal	Rp	174,250,000	
2 Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya	Rp	500,000,000	
3	Rp	500,000,000	
4 Pembinaan Usaha mikro Makanan Olahan	Rp	545,000,000	
5 Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan	Rp	200,000,000	
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Panggung Reklame Kerajinan Tradisioanal Kota Tasikmalaya	Rp	80,000,000	
8 Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan Kota Tasikmalaya (DAK-Reguler Tahun 2018)	Rp	7,000,000,000	
9 Penyusunan Rencana Pembangunan industri Kota Tasikmalaya	Rp	100,000,000	
	Rp	8,925,000,000	

Kepala Bidang UMKM dan Industri,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Tasikmalaya



Drs. MAMAN DURMAN
NIP. 19600325 198303 1 009

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasi UMKM dan Industri Agro,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



R. DADANG GINANJAR, ST.
NIP. 19751026 200312 1 006


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin dari sektor industri dan perdagangan	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	66%
2	Meningkatnya pelaku usaha industri dan perdagangan	Persentase UMKM yang dibina	100%
		Nilai Ekspor bersih (dalam\$)	29.321.838,46 USD
		Persentase tindak Lanjut hasil pameran/persentase keberhasilan hasil kerjasama	100%
3	Meningkatnya jumlah wirausaha baru bidang perindustrian dan perdagangan	Cakupan Usaha Informal yang dibina	100%
		Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 554,763,300	
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 930,000,000	
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 1,716,000,000	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp 50,000,000	
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 100,000,000	
7	Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Pasar	Rp 3,874,697,000	
8	Program Fasilitas Pengadaan Tanah Pemerintah	Rp 20,000,000,000	
9	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Rp 1,002,382,600	
		Rp 28,227,842,900	

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. M. FIRMANSYAH, SH., MH.
NIP. 19620418 198903 1 010

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI SARANA PRASARANA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Tersedianya data hasil monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan
		Luas tanah yang tersedia untuk sarana perdagangan	2 Ha
		Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	2 unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Rp 100,000,000	
2 Revitalisasi Pasar Rakyat Indhiang (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp 1,000,000,000	
3 Revitalisasi Pasar Rakyat Cibauti (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp 1,897,000,000	
4 Pengadaan Tanah untuk Sarana Perdagangan	Rp 20,000,000,000	
	Rp 22,997,000,000	

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya

Kasi Sarana Prasarana
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003



Hj. NINGNING RUKMNI. BA
NIP. 19640323 198903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI SARANA PRASARANA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTP yang Betera Sah	Tersedianya data hasil monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan
		Luas tanah yang tersedia untuk sarana perdagangan	2 Ha
		Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	2 unit

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Rp	100.000.000	
2	Revitalisasi Pasar Rakyat Indihiang (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp	1.000.000.000	
3	Revitalisasi Pasar Rakyat Cibeuti (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp	1.897.000.000	
4	Pengadaan Tanah untuk Sarana Perdagangan	Rp	20.000.000.000	
		Rp	22.997.000.000	

Tasikmalaya, 13 Juli 2018

Kepala Bidang Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Kasi Perlindungan Konsumen
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



DADAN ISKANDAR, S.TP., ME
NIP. 19750916 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI BINA USAHA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase UMKM yang dibina	Jumlah wirausaha baru yang dilatih	200 orang
		Jumlah UMKM yang dipromosikan	10 UMKM
		Jumlah UMKM yang dilatih	78 orang
		Jumlah UMKM yang dipromosikan	80 UMKM
		Jumlah UMKM yang dilatih	18 orang
2	Cakupan Usaha informal yang dibina	Jumlah PKL yang dibina	
		Jumlah usaha mikro yang dibina	200 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan	Rp 930.000.000	
3 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 760.000.000	
4 Pelatihan Teknik Perbengketan	Rp 356.000.000	
5 Pameran Tasik Kreatif	Rp 500.000.000	
6 Pembinaan Usaha Jasa Servis Elektronik	Rp 100.000.000	
7 Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Rp 100.000.000	
8 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan	Rp 1.000.000.000	
	Rp 3.746.000.000	

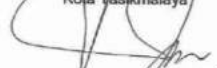
Kepala Bidang Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kasi Bina Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



ACENG MUSTOFA, S.Sos
NIP. 19630906 198610 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Jumlah UTTP yang dilayani	10.000 unit
		Jumlah jenis standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian yang dikelola	4 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan tera Ulang	Rp 84,000,000	
2 Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrolagian	Rp 110,000,000	
3 Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal	Rp 110,763,300	
	Rp 304,763,300	

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Kepala UPTD Metrologi Legal
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. ROSID
NIP. 19620921 198303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI SARANA PRASARANA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Tersedianya data hasil monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan
		Luas tanah yang tersedia untuk sarana perdagangan	2 Ha
		Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	2 unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Rp 100.000.000	
2 Revitalisasi Pasar Rakyat Indihiang (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp 1.000.000.000	
3 Revitalisasi Pasar Rakyat Cibauti (DAK - Penugasan Bidang Pasar)	Rp 1.897.000.000	
4 Pengadaan Tanah untuk Sarana Perdagangan	Rp 20.000.000.000	
	Rp 22.997.000.000	

Kepala Bidang Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Tasikmalaya, 13 Juli 2018

Kasi Perlindungan Konsumen
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



DADAN ISKANDAR, S.TP., ME
NIP. 19750916 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI BINA USAHA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase UMKM yang dibina	Jumlah wirausaha baru yang dilatih	200 orang
		Jumlah UMKM yang dipromosikan	10 UMKM
		Jumlah UMKM yang dilatih	78 orang
		Jumlah UMKM yang dipromosikan	80 UMKM
		Jumlah UMKM yang dilatih	18 orang
2	Cakupan Usaha informal yang dibina	Jumlah PKL yang dibina	
		Jumlah usaha mikro yang dibina	200 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan	Rp 930.000.000	
3 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 760.000.000	
4 Pelatihan Teknik Perbengkelan	Rp 356.000.000	
5 Pameran Tasik Kreatif	Rp 500.000.000	
6 Pembinaan Usaha Jasa Servis Elektronik	Rp 100.000.000	
7 Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Rp 100.000.000	
8 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan	Rp 1.000.000.000	
	Rp 3.746.000.000	

Kepala Bidang Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kasi Bina Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



ACENG MUSTOFA, S.Sos
NIP. 19630908 198610 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Jumlah UTTP yang dilayani	10.000 unit
		Jumlah jenis standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian yang dikelola	4 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan tera Ulang	Rp 84,000,000	
2 Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrolgian	Rp 110,000,000	
3 Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal	Rp 110,763,300	
	Rp 304,763,300	

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Kepala UPTD Metrologi Legal
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. ROSID
NIP. 19620921 198303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI METROLOGI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Jumlah peserta sosialisasi	690 orang
		Jumlah BDKT, Satuan Ukuran, dan UTTP yang dilawasi	410 buah

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Metrologi Legal	Rp 80,000,000	
2 Sosialisasi Metrologi Legal	Rp 70,000,000	
	Rp 150,000,000	

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610306 198302 1 003

Pt. Kasi Metrologi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. ROSID
NIP. 19620921 198303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**KASI PENGAWASAN METROLOGI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Alat UTTP yang Betera Sah	Jumlah peserta sosialisasi	690 orang
		Jumlah BDKT, Satuan Ukuran, dan UTTP yang diawasi	410 bush

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Metrologi Legal	Rp 80.000.000	
2 Sosialisasi Metrologi Legal	Rp 70.000.000	
	Rp 150.000.000	

Tasikmalaya, 13 Juli 2018

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. URON, SH, MM
NIP. 19610305 198302 1 003

Kasi Metrologi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



GILANG GINANJAR, SE
NIP. 19860120 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**BIDANG KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Akuntansi administrasi verifikasi	Persentase Koperasi yang dibina	1 dokumen
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase UMKKM yang terakses dukungan usaha	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 280.000,000	
2 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 410.000,000	
3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 55.000,000	
	Rp 745.000,000	

Tasikmalaya, 1 Februari 2018

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. M. FIRMANSYAH, SH, MH
NIP. 19620418 198903 1 010

Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. WAWAN HERMAWAN, SE
NIP. 19610812 198903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASI USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase UMKKM yang terakses dukungan usaha	Jumlah UMKM yang diintermediasi	30 UMKM
		Jumlah UMKM yang mengikuti diseminasi	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Intermediasi Pelaku Usaha Mikro dengan Lembaga Keuangan	Rp 120.000.000	
2 Diseminasi Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil	Rp 85.000.000	
3 Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Usaha Mikro	Rp 75.000.000	
4 Pengembangan Kerjasama Komitraan	Rp 55.000.000	
	Rp 335.000.000	

Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. WAWAN HERMAWAN, SE
NIP. 19610812 198903 1 006

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasi Organisasi dan Manajemen,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



TETY RAHMAWATI TJANDRA S.Sos.,ST
NIP. 19690311 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASI KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Koperasi yang dibina	Jumlah koperasi yang dibina	100 koperasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya	Rp 150.000.000	
2 Penilaian Kesehatan Koperasi	Rp 80.000.000	
3 Pendampingan Revitalisasi Koperasi	Rp 180.000.000	
	Rp 410.000.000	

Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



H. WAWAN HERMAWAN, SE
NIP. 19610812 198903 1 006

Tasikmalaya, 1 Februari 2018
Kasi Koperasi, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



IHIN SURYANTO, S.IP
NIP. 19601104 198212 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

2. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Untuk menghitung tingkat capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 selengkapnya dapat terlihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sebagai instansi pemerintah, evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan, berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2018 dan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, dijelaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Evaluasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan



Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Cakupan layanan administrasi perkantoran			
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3	3	100
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
Waktu penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100
Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	7	7	100
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	42	42	100
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	100
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	15	15	100
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	9	100
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	100
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21	21	100
Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	7	7	100
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2	100

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (mamin harian, mamin rapat, mamin tamu, mamin kegiatan)	9	9	100
Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	12	12	100
Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	12	12	100
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai	12	12	100

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			
Jumlah mobil jabatan yang diadakan	2	2	100
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	2	100
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	1	100
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	5	5	100
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	37	37	100
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	10	10	100
Tersedianya jasa prasarana aparatur	100%	100%	100
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8	8	100

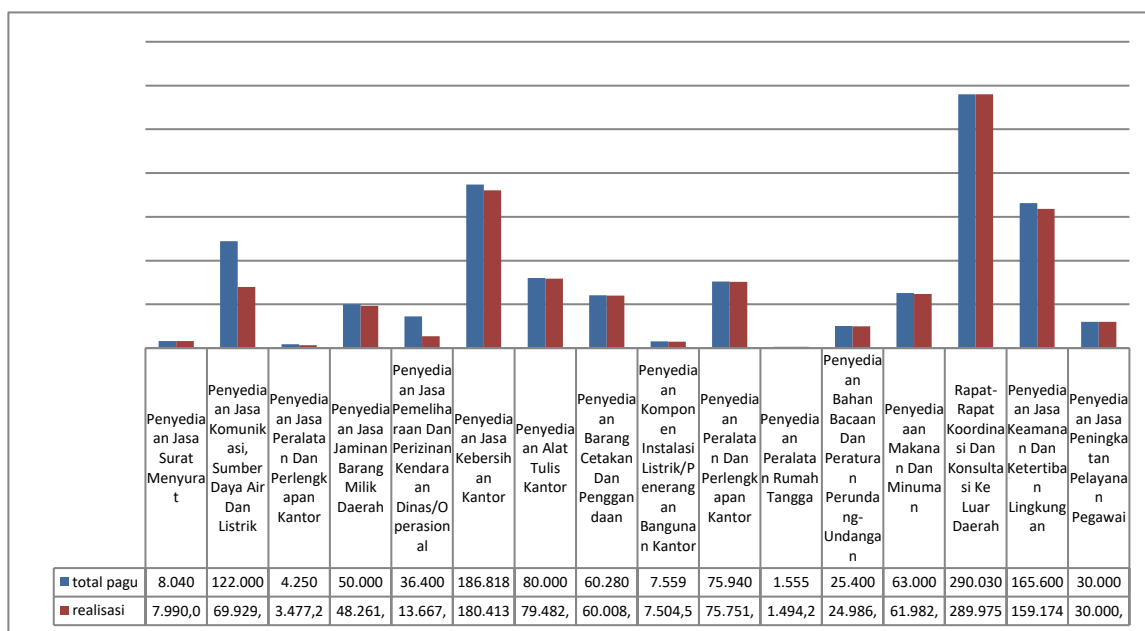
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Tingkat kepatuhan aparatur			
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	54	54	100
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54	54	100

Untuk sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**

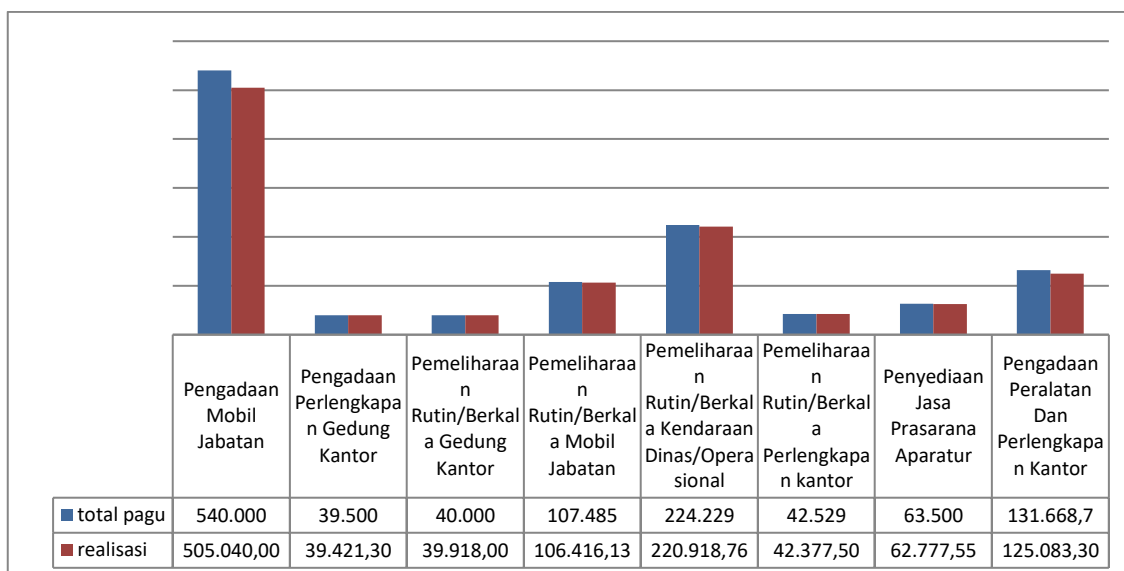
terdiri dari 4 program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

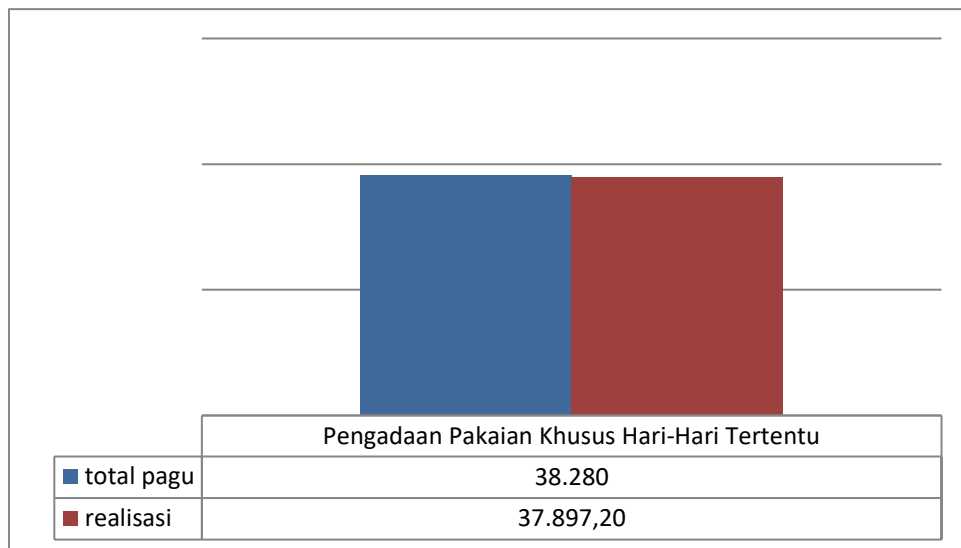
Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Cakupan layanan administrasi perkantoran memiliki total anggaran Rp.1.206.872.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp.1.114.099.006,- atau sebesar 92,31% dengan rincian sebagai berikut:



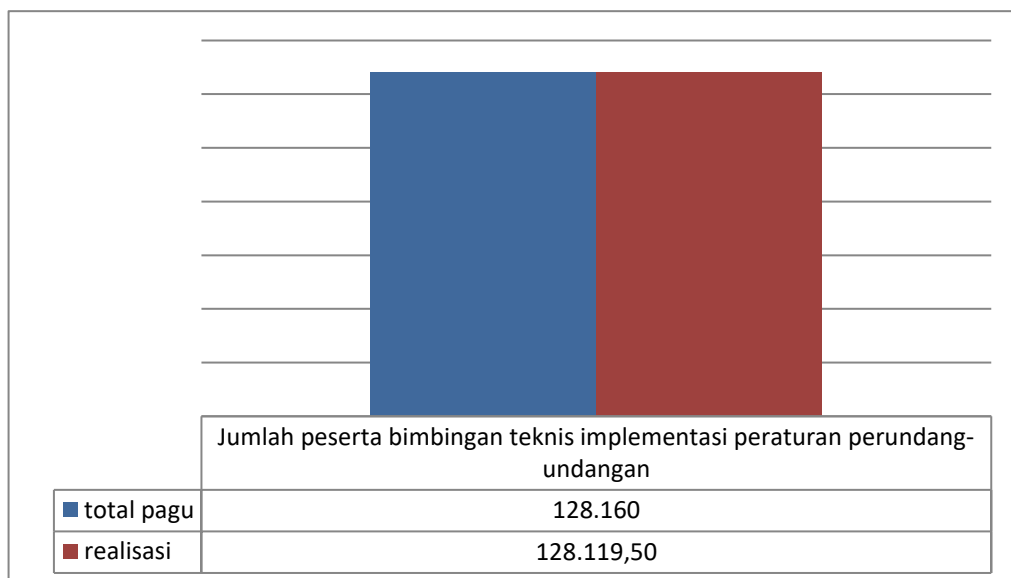
Untuk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur memiliki total anggaran Rp.1.188.901.700,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 1.141.942.540,- atau sebesar 96,05% dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Indikator Tingkat kepatuhan aparatur memiliki total anggaran Rp.38.280.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp.37.897.200,- atau sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya memiliki total anggaran Rp. 128.160.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 128.160.000,- atau sebesar 99,97% dengan rincian sebagai berikut :



2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

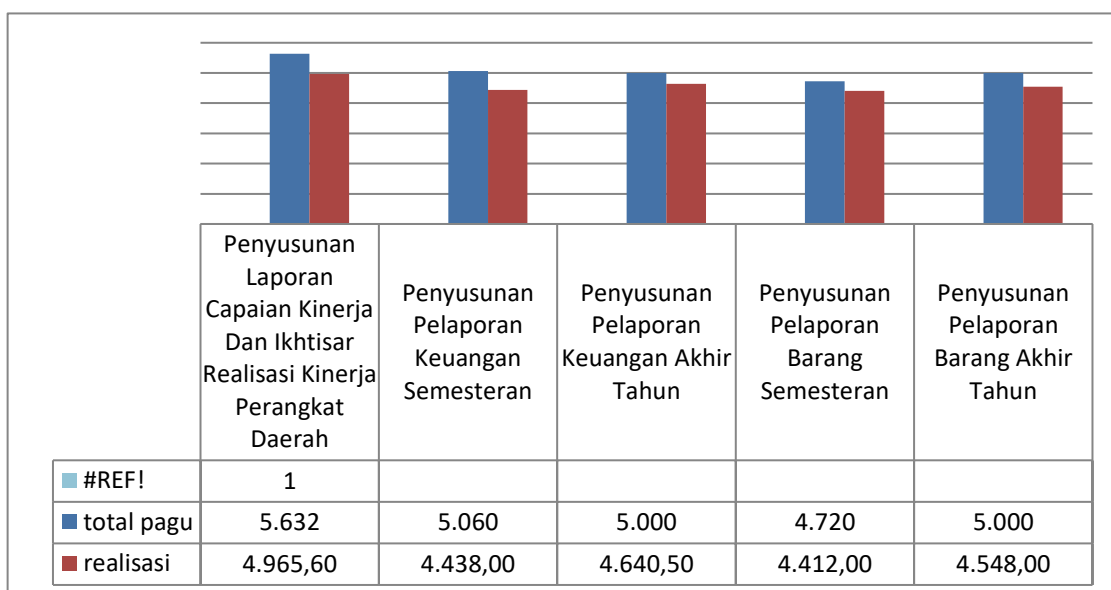
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah laporan barang yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Jumlah laporan barang yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Tersusunnya perencanaan kerja			
Tersusunnya rencana kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Tersusunnya rencana strategis	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah			
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral Dinas KUMKM Perindag	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Tersedianya dokumen monev program dan kegiatan Dinas KUMKM Perindag	4 Dokumen	4 Dokumen	100

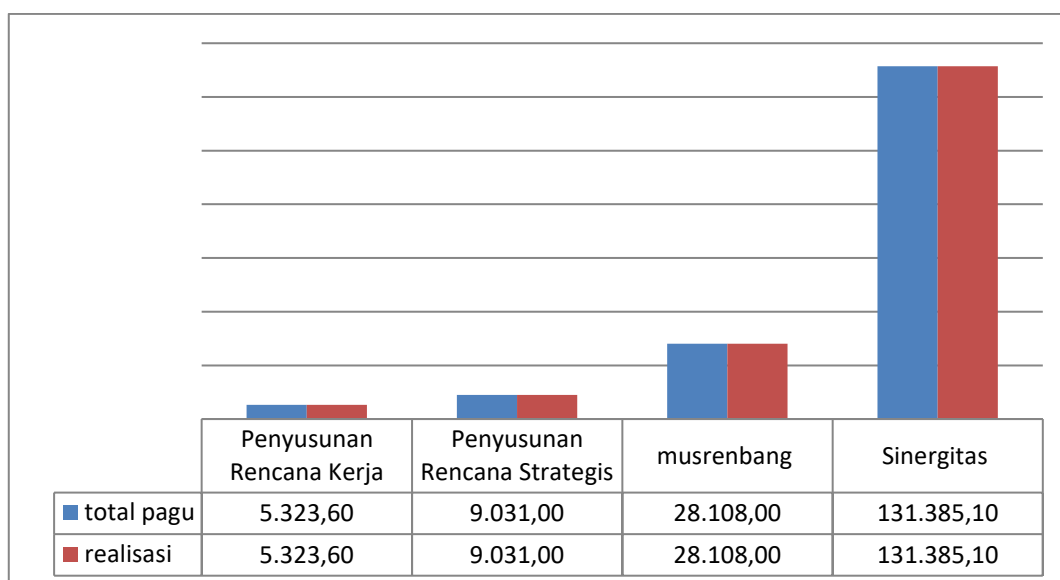
Untuk sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** terdiri dari 2 program yaitu

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2. Program Perencanaan Kerja

Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan Indikator Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki total anggaran Rp. 25.412.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 23.004.100,- atau sebesar 90,53% dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Program Perencanaan Kerja dengan Indikator Tersusunnya perencanaan kerja memiliki total anggaran Rp. 178.640.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 173.847.700,- atau sebesar 97,32% dengan rincian sebagai berikut :

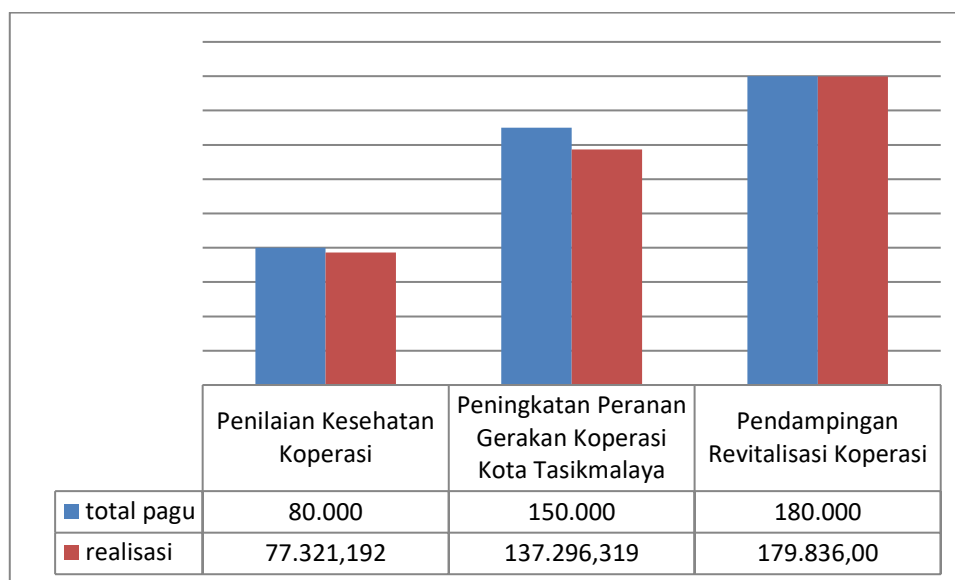


3 Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Persentase Koperasi yang dibina			
Jumlah koperasi yang dinilai	120 koperasi	120 koperasi	100
Jumlah koperasi yang dibina	100 kopersi	100 kopersi	100
Jumlah koperasi yang direvitalisasi	50 koperasi	120 koperasi	240

Untuk sasaran **Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas** memiliki 1 program yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang dibina memiliki total anggaran

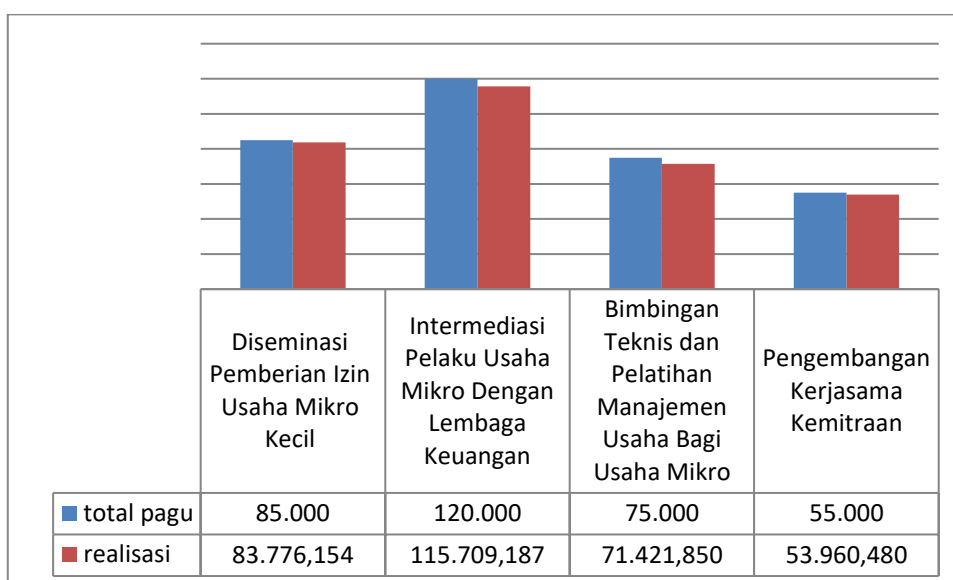
Rp.410.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.394.453.511,- atau sebesar 96,21%, dengan rincian :



4 Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Persentase Usaha Mikro yang terakses dukungan usaha			
Jumlah UMKM yang mengikuti diseminasi	50 orang	150 orang	300
Jumlah usaha mikro yang diintermediasi	500 orang	650 orang	130
Jumlah usaha mikro yang dilatih	50 orang	50 orang	100
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	50 orang	50 orang	100

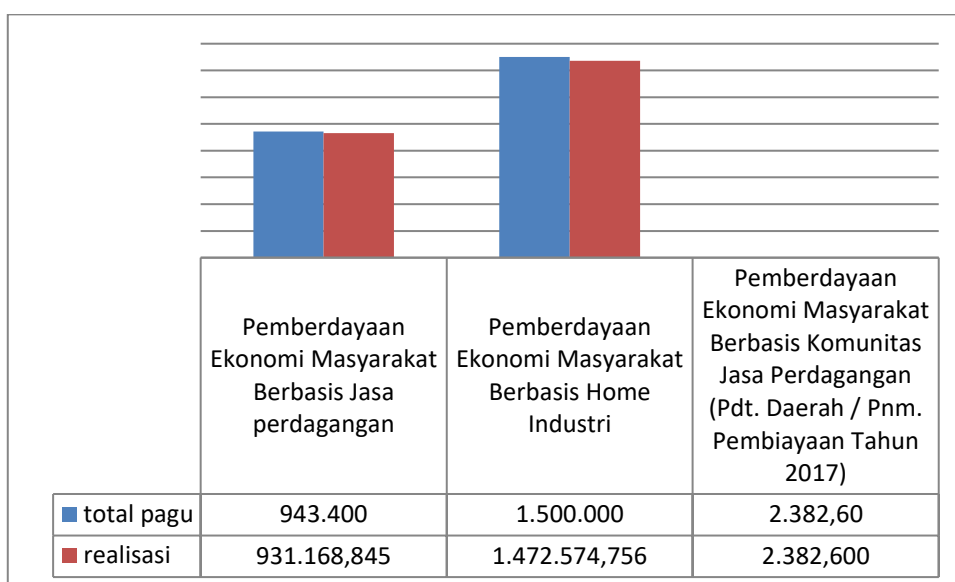
Untuk sasaran **Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas** memiliki 1 program yaitu Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang terakses dukungan usaha memiliki total anggaran Rp.335.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.325.397.671,- atau sebesar 97,13%, dengan rincian :



5 Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Persentase jumlah masyarakat yang dibina			
Jumlah masyarakat yang dibina (orang)	200 orang	200 orang	100
Jumlah masyarakat yang dibina (orang)	250 orang	250 orang	100
Jumlah sp2d yang diselesaikan (buah)	1 dokumen	1 dokumen	100

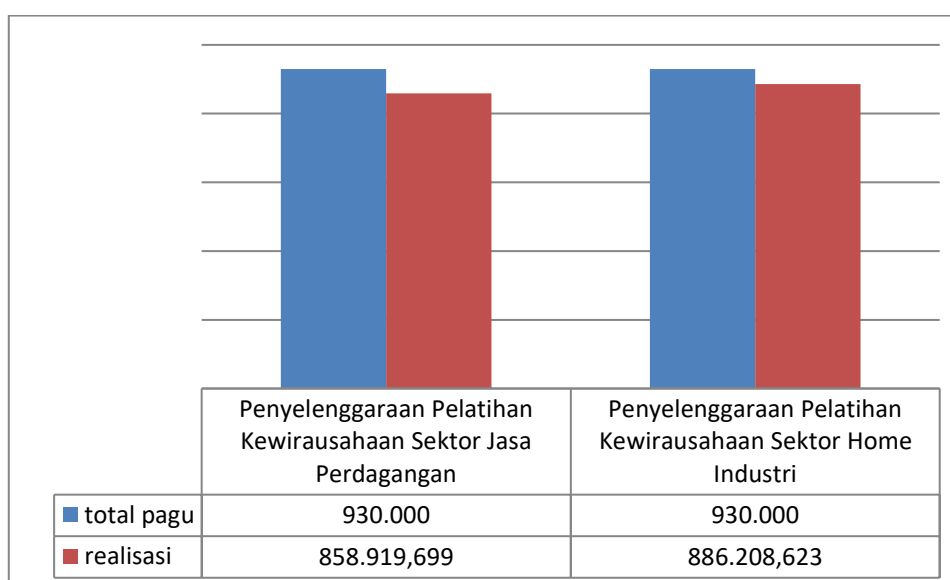
Untuk sasaran **Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan** memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan indikator Persentase jumlah masyarakat yang dibina. Dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.445.783.000,- dapat terealisasi sebesar 98,38% yaitu sebesar Rp.2.406.126.201.,- dengan rincian sebagai berikut



6 Meningkatnya jumlah wirausaha baru

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Persentase Usaha Baru yang dibina			
Jumlah WUB sektor perdagangan	200 orang	200 orang	100
Jumlah WUB sektor industri	200 orang	200 orang	100

Untuk sasaran **Meningkatnya jumlah wirausaha baru** memiliki 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan indikator Persentase Usaha Baru yang dibina. Dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.860.000.000,- dapat terealisasi sebesar 93,82% yaitu sebesar Rp.1.745.128.322,- dengan rincian sebagai berikut



7

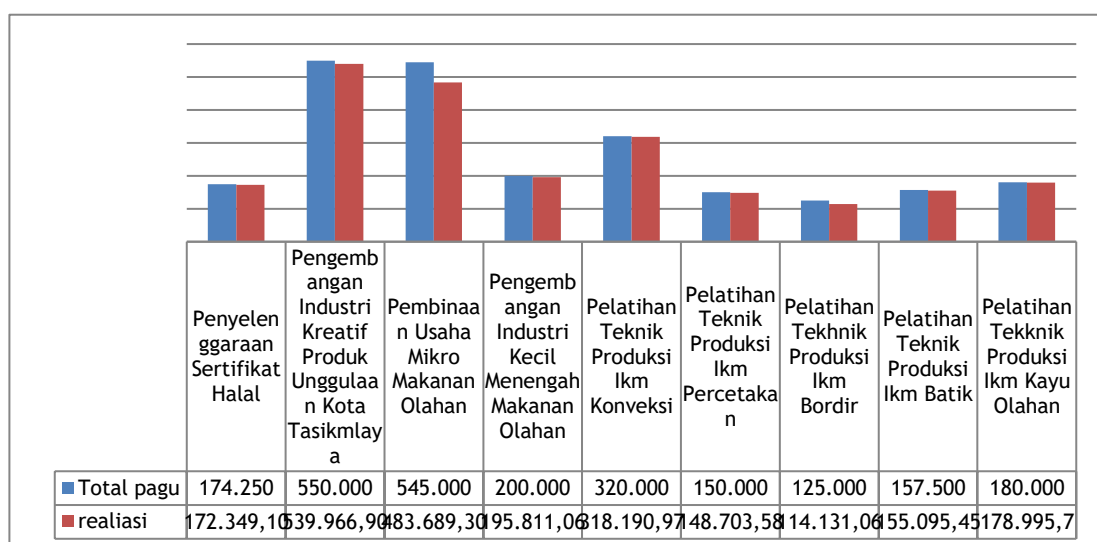
Meningkatnya pertumbuhan industri

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Jumlah IKM yang dibina	50 IKM	50 IKM	100
Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat halal	25 IKM	32 IKM	128
Jumlah IKM Industri Kreatif yang dikembangkan	25 IKM	50 IKM	200
Jumlah IKM yang dibina	10 IKM	20 IKM	200
Jumlah IKM yang dibina	40 IKM	135 IKM	338
Jumlah IKM yang dibina	60 IKM	60 IKM	100
Jumlah IKM yang dibina	54 IKM	54 IKM	100
Jumlah IKM yang dibina	50 IKM	50 IKM	100
Jumlah IKM yang dibina	51 IKM	51 IKM	100
Jumlah IKM yang dibina	50 IKM	50 IKM	100
Penataan Struktur Industri			
Jumlah dokumen RPIK yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	100
Persentase sentra IKM yang dikembangkan			
Jumlah Gapura/ Papan sentra yang dipelihara	3 sentra	3 sentra	100
Jumlah Sentra IKM yang dibangun	1 sentra	1 sentra	100

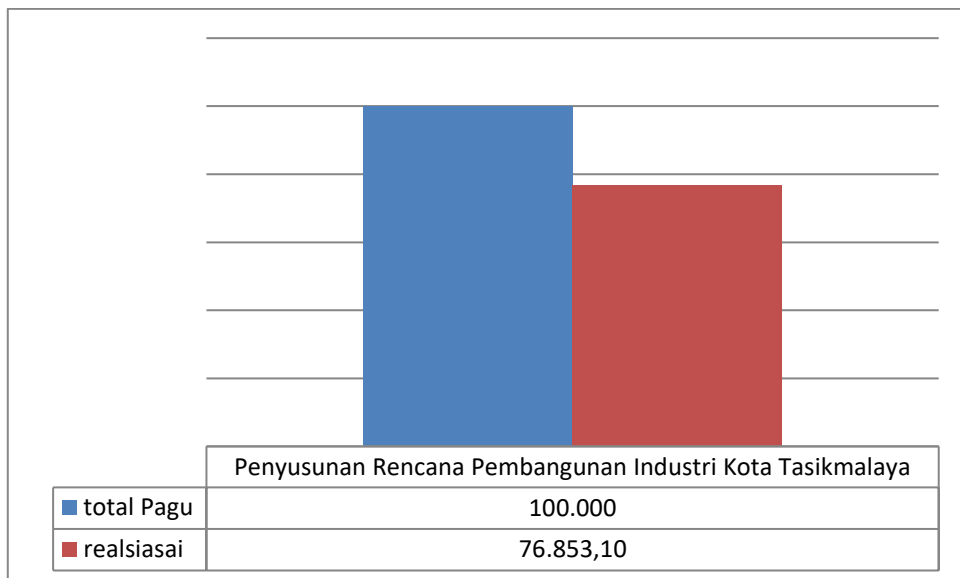
Untuk sasaran **Meningkatnya pertumbuhan industri** terdiri dari 3 program yaitu

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

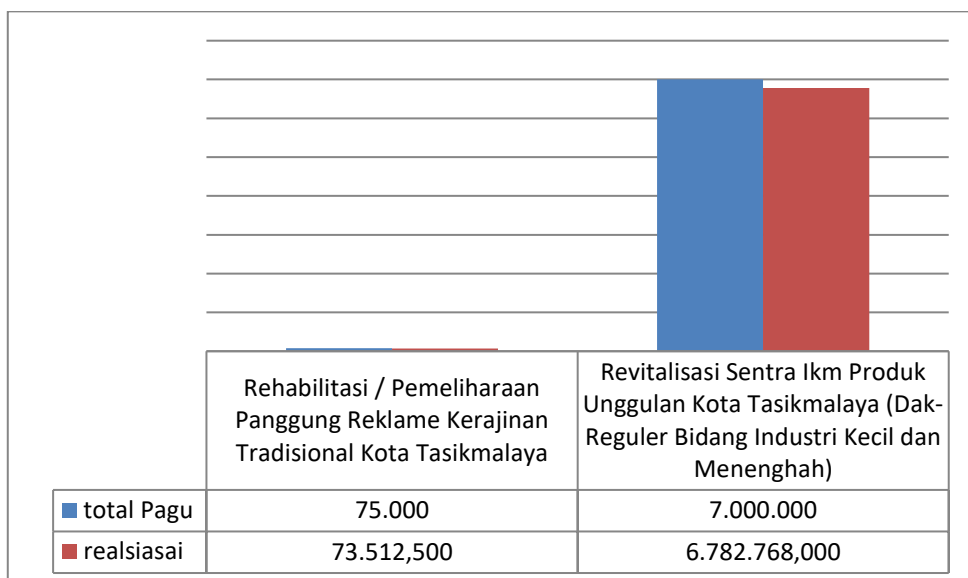
Untuk Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator Jumlah IKM yang dibina memiliki total anggaran Rp. 2.401.750.000,- dapat terelaisasikan sebesar Rp.2.306.933.229,- atau sebesar 96.05%, dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Program Penataan Struktru industri dengan Indikator memiliki total anggaran Rp. 100.000.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 76.853.100,- atau sebesar 76,85 %, meski demikian target tingkat capaiannya mencapai 100%, dengan rincian sbagai berikut:



Untuk Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan Indikator Persentase sentra IKM yang dikebangkan memiliki total anggaran Rp. 7.075.000.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 6.856280.500,- atau sebesar 96,91 %, dengan rincian sebagai berikut:



8

Meingkatnya distribusi usaha Perdagangan dan Metrologi legal

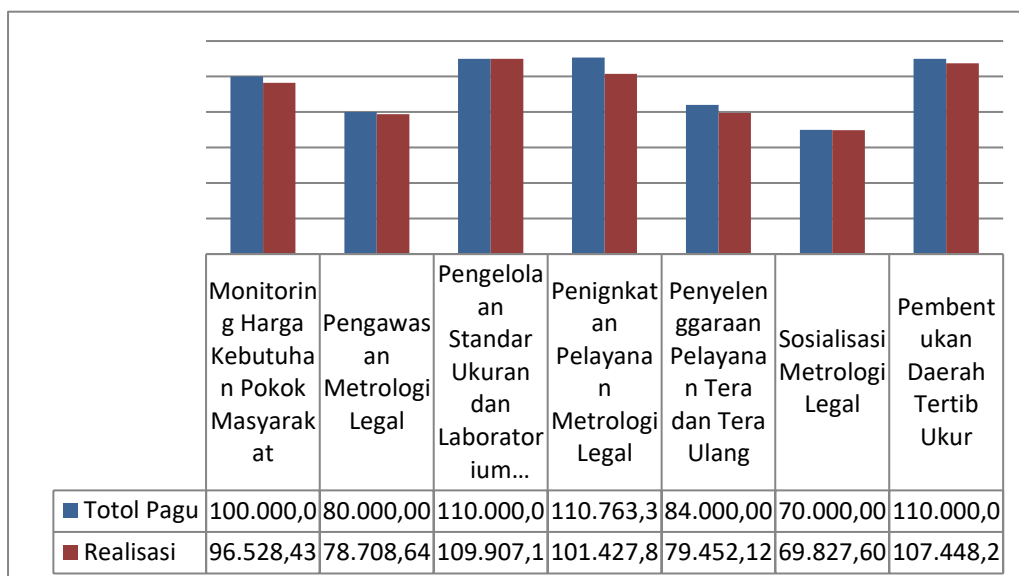
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Cakupan layanan metrologi legal			
Terpantaunya fluktuasi harga	12 bulan	12 bulan	100

kebutuhan pokok masyarakat			
Jumlah UTTP yang diawasi	410 unit	535 unit	130
Jumlah jenis standar ukuran dan laboratorium kemetrologian yang dikelola	4 jenis	4 jenis	100
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan metrologi legal	12 bulan	12 bulan	100
Jumlah UTTP yang dilayani	10000 unit	22435 unit	224
Jumlah peserta sosialisasi	690 orang	690 orang	100
Terlaksananya penetapan dan Evaluasi daerah Tertib ukur	250 lokus	250 lokus	100
Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor			
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	30 orang	30 orang	100
Persentase Pelaku usaha yang dibina			
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	10 pelaku	35 pelaku	350
Jumlah pelaku usaha yang dibina	78 orang	78 orang	100
Jumlah pelaku usaha yang dibina	18 pelaku	18 pelaku	100
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	80 orang	146 orang	183
Terlaksananya Penyusunan Fesibility Study Pengadaan Lahan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	1 dokumen	1 dokumen	100
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal			
Jumlah PKL yang dibina	200 PKL	200 PKL	100
Persentase Pasar yang dibina			
	1 pasar	1 pasar	100
	1 pasar	1 pasar	100
jumlah sarana metrologi yang disediakan	1 pasar	1 pasar	100
jumlah pasar rakyat yang direvitaliasi	1 pasar	1 pasar	100
jumlah pasar rakyat yang direvitaliasi	1 pasar	1 pasar	100
	1 pasar	1 pasar	100

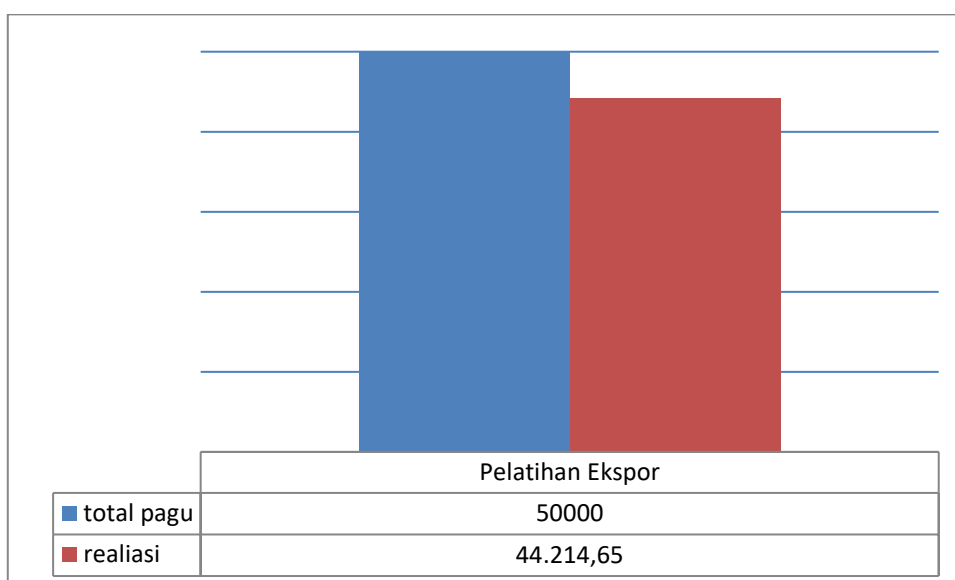
Untuk sasaran **Meningkatnya distribusi usaha Perdagangan dan Metrologi legal** terdiri dari 5 program yaitu

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar

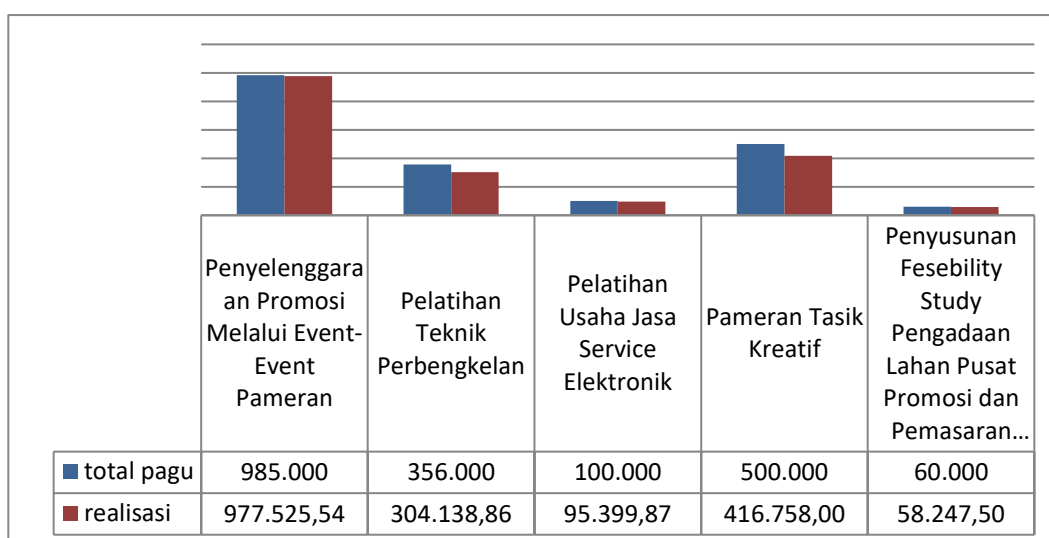
Untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Indikator Cakupan layanan metrologi legal memiliki total anggaran Rp. 664.763.300,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 643.299.960- atau sebesar 96,77 %, dengan rincian sebagai berikut:



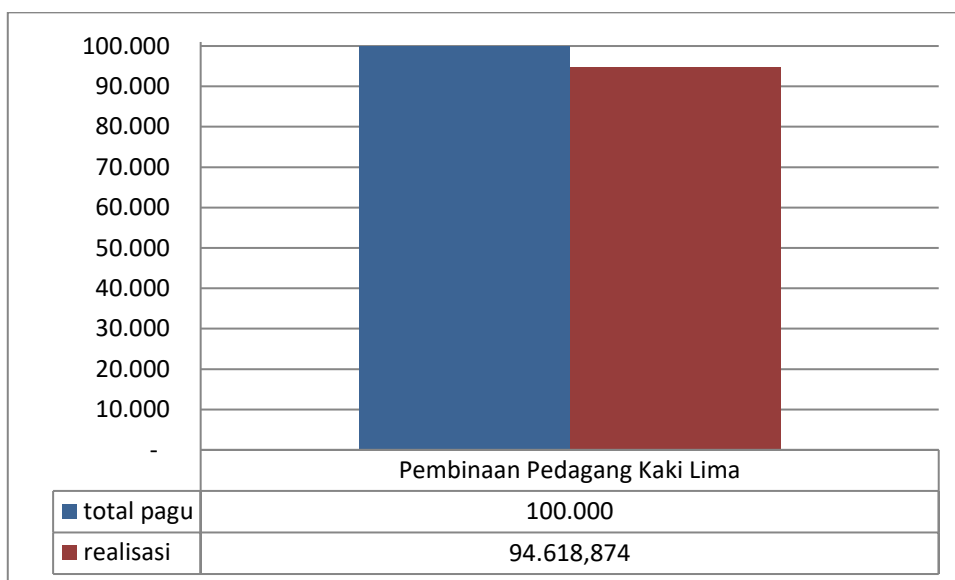
Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan Indikator Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor memiliki total anggaran Rp. 50.000.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 44.214.650- atau sebesar 88,43 %, meski demikian capaian fisiknya mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut:



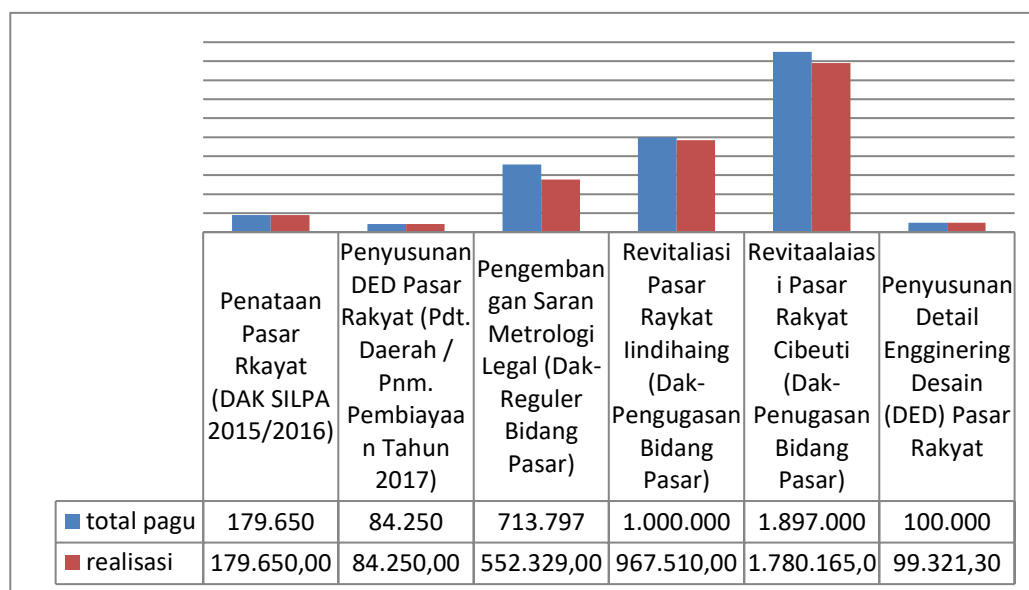
Untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Indikator Persentase Pelaku usaha yang dibina memiliki total anggaran Rp.2.001.000.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 1.852.069.800- atau sebesar 92,56%, dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan Indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal memiliki total anggaran Rp. 100.000.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp. 94.618.874 atau sebesar 94,62%, dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar dengan Indikator Persentase Pasar yang dibina memiliki total anggaran Rp. 3.874.697.000,- dapat terelisasikan sebesar Rp.3.663.225.300,- atau sebesar 94,54%, dengan rincian sebagai berikut:



Realisasi Tahun ini dengan Tahun-tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Cakupan layanan administrasi perkantoran				
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%
Waktu penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%
Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	100%	100%	100%	100%
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	-	100%
Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (mamin harian, mamin rapat, mamin tamu, mamin kegiatan)	100%	100%	100%	100%
Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	100%
Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	100%	100%	100%	100%
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				
Jumlah mobil jabatan yang diadakan	100%	100%	100%	-
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	100%
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	100%
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	100%
Tersedianya jasa prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Tingkat kepatuhan aparatur				
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100%	100%	100%	100%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	15,09%	17,46%

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Jumlah laporan barang yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah laporan barang yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Tersusunnya perencanaan kerja				
Tersusunnya rencana kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Tersusunnya rencana strategis	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral Dinas KUMKM Perindag	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Tersedianya dokumen monev program dan kegiatan Dinas KUMKM Perindag	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Persentase Usaha Mikro yang terakses dukungan usaha				
Jumlah UMKM yang mengikuti diseminasi	150 orang	-	-	-
Jumlah usaha mikro yang diintermediasi	650 orang	-	-	-
Jumlah usaha mikro yang dilatih	50 orang	-	-	-
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	50 orang	-	-	-

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Persentase Usaha Mikro yang terakses dukungan usaha				
Jumlah koperasi yang dinilai	100%	100%	-	-
Jumlah koperasi yang dibina	100%	100%	100%	100%
Jumlah koperasi yang direvitalisasi	100%	-	-	-

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina				

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan	200 orang	200 orang	-	-
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri	250 orang	225 orang	-	-
Jumlah sp2d yang diselesaikan (buah)	1	-	-	-
INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Persentase Wira Usaha Baru yang dibina				
Jumlah WUB sektor perdagangan	200 orang	-	-	-
Jumlah WUB sektor industri	200 orang	-	-	-

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Jumlah IKM yang dibina				
Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat halal	50 IKM	50 IKM	-	-
Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya	32 IKM	12 IKM	10 IKM	40 IKM
Pembinaan Usaha Mikro makanan Olahan	50 IKM	85 IKM	10 IKM	-
Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan	20 IKM	10 IKM	5 IKM	-
Pelatihan Teknik Produksi IKM Konveksi	135 IKM	60 IKM	2 IKM	-
Pelatihan Teknik Produksi IKM Percetakan	60 IKM	15 IKM	-	-
Pelatihan Desain Produk Bordir	54 IKM	-	-	-
Pelatihan Teknik Produksi IKM batik	50 IKM	-	-	-
Pelatihan Teknik Produksi IKM Kayu olahan	51 IKM	-	-	-
Persentase sentra IKM yang dikembangkan				
Jumlah Gapura/ Papan sentra yang dipelihara	3 unit	4 Unit	8 unit	3 unit
Jumlah Sentra IKM yang dibangun	1 unit	-	-	-
Program Penataan Struktur Industri				

Jumlah dokumen RPIK yang disusun	1 dokumen	-	-	-
----------------------------------	-----------	---	---	---

INDIKATOR	2018	2017	2016	2015
Persentase Pelaku usaha yang dibina				
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	3 event	3 event	3 event	3 event
Pelatihan Teknik Perbengkelan	78 orang	20 orang	24 orang	-
Pameran Tasik Kreatif	146 UMKM	80 UMKM	-	-
Pelatihan Usaha Jasa Sound System dan Jasa Service Elektronik	18 orang	40 orang	-	-
Terlaksananya Penyusunan Fesibility Study Pengadaan Lahan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	1 paket	-	-	-
Cakupan layanan metrologi legal				
Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah UTTP yang dilayani	10.000 unit	10.000 unit	10.000 unit	10.000 unit
Jumlah UTTP yang diawasi	410 perusahaan	200 perusahaan	-	-
Jumlah jenis standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian yang dikelola	4 jenis UTTP	4 jenis UTTP	-	-
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan metrologi legal	12 bulan	-	-	-
Jumlah peserta sosialisasi metrologi	690 orang	-	-	-
Terlaksananya penetapan dan Evaluasi daerah Tertib ukur	250 lokasi	-	-	-
Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor				
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	30 orang	-	-	-
Terbinanya pedagang kaki lima				
Jumlah PKL yang dibina	200 PKL	-	-	-
Persentase Pasar yang				

dibina				
Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK Penugasan)	2 pasar rakyat	1 pasar rakyat	1 pasar rakyat	1 pasar rakyat
Penataan Pasar Rakyat (DAK-SILPA 2015/2016)	1 pasar rakyat	1 pasar rakyat	-	-
Penyusunan DED Pasar Rakyat	1 dokumen	2 dokumen	-	-
Penyusunan DED Pasar Rakyat (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017)	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Bila dilihat secara keseluruhan, capaian indikator dari tahun ke tahun relatif dapat tercapai dengan baik. Hanya terdapat sedikit kendala dalam memperbandingkan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu perbedaan satuan target capaian. Hal ini lebih disebabkan pada perbedaan dokumen perencanaan lima tahunan baik tingkat Pemerintah Kota maupun di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian, umumnya jumlah UKM / IKM yang dibina relatif mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada dokumen LKIP ini belum dapat pula ditampilkan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta, termasuk kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional mengingat data yang sulit didapat.

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing		
Tujuan 1	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro		
Sasaran 1	Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan	Dicapai melalui :	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Jasa perdagangan	
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Home Industri	
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017)	
Sasaran 2	Meningkatnya jumlah koperasi	Dicapai melalui :	

	berkualitas	<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i> Penilaian Kesehatan Koperasi Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya Pendampingan Revitalisasi Koperasi
Sasaran 3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	Dicapai melalui : <i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i> Diseminasi Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Intermediasi Pelaku Usaha Mikro Dengan Lembaga Keuangan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro Pengembangan Kerjasama Kemitraan Diseminasi Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil
Sasaran 4	Meningkatnya pertumbuhan industri	Dicapai melalui : <i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i> Penyelenggaraan Sertifikat Halal Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan Pelatihan Teknik Produksi Ikm Konveksi Pelatihan Teknik Produksi Ikm Percetakan Pelatihan Teknik Produksi Ikm Bordir Pelatihan Teknik Produksi Ikm Batik Pelatihan Teknik Produksi Ikm Kayu Olahan <i>Program Penataan Struktur Industri</i> Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya <i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya</i> Rehabilitasi / Pemeliharaan

		Panggung Reklame Kerajinan Tradisional Kota Tasikmalaya
		Revitalisasi Sentra Ikm Produk Unggulan Kota Tasikmalaya (Dak-Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah)
Sasaran 5	Meingkatnya distribusi usaha Perdagangan dan Metrologi legal	Dicapai melalui :
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
		Pengawasan Metrologi Legal
		Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrolgian
		Penignkatan Pelayanan Metrologi Legal
		Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang
		Sosialisasi Metrologi Legal
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Pelatihan Ekspor
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Penyelenggaraan Promosi Melalui Event-Event Pameran
		Pelatihan Teknik Perbengkelan
		Pelatihan Usaha Jasa Service Elektronik
		Pameran Tasik Kreatif
		Penyusunan Fesibility Study Pengadaan Lahan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk UMKM
		Penyelenggaraan Promosi Melalui Event-Event Pameran
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Pembinaan Pedagang Kaki Lima
		Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar
		Penataan Pasar Rakyat (DAK SILPA 2015/2016)
		Penyusunan DED Pasar Rakyat (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017)
		Pengembangan Saran Metrologi Legal (Dak-Reguler Bidang Pasar)
		Revitaliasi Pasar Rakyat lindihaing (Dak-Pengugasan Bidang Pasar)
		Revitaalaiasi Pasar Rakyat Cibeuti (Dak-Penugasan Bidang Pasar)

		Penyusunan Detail Engginering Desain (DED) Pasar Rakyat
Sasaran 6	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Dicapai melalui :
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri
Misi 2	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik profesional dan akuntabel	
Tujuan 1	Meningkatnya pelayanan dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Dicapai melalui :
		Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Makanan Dan Minuman
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan
		Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
		Pengadaan Mobil Jabatan

		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan kantor
		Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
		Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Dicapai melalui :
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
		Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
		Program Perencanaan Kerja
		Penyusunan Rencana Kerja
		Penyusunan Rencana Strategis
		musrenbang
		Sinergitas

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicator (KPI)* Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2018

No	IKU	Satuan	Target 2018	Realisasi	%
1	Persentase koperasi sehat	%	2	7	350
2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	2	3,3	165
3	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	100	100	100
4	Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	500	650	130
5	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	-	-	-
6	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	%	-	-	-
7	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	100	100	100
8	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	400	400	100
9	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450	450	100
10	Nilai ekspor bersih	US\$	38000000	34385656,02	90.48857
11	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	2	0	0
12	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	5	100
13	Persentase alat UTTP yang berterasa sah	%	50	80	160
14	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	100	100	100
15	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	100	100	100
16	Persentase Pasar	%	100	100	100

	yang dibina				
17	Persentase pertumbuhan industri	%	2	10	500
18	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	%	4	4	100

Dari Tabel 3.2 di atas, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 relatif baik, dari 18 (delapanbelas) indikator hanya 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan 5 indikator sisanya memiliki capaian melampaui target yang telah ditetapkan.

IKU yang melampaui target yang ditetapkan :

- 1) Indikator Persentase koperasi sehat, memiliki tingkat capaian sebesar 350%. Dari target sebanyak 2% pada tahun 2018 tercapai 7%.
- 2) Indikator Persentase usaha mikro yang bersertifikat, memiliki tingkat capaian target sebesar 165%. Dari target sebanyak 2 % tahun 2018 tercapai 3,3%
- 3) Indikator Jumlah Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha, memiliki tingkat capaian target sebesar 130%. Dari target sebanyak 500 UKM tahun 2018 tercapai 650 UKM
- 4) Indikator Persentase alat UTTP yang bertera sah, memiliki tingkat capaian target sebesar 160%. Dari target sebanyak 50% tahun 2018 tercapai 80% UKM
- 5) Indikator Persentase pertumbuhan industri, memiliki tingkat capaian target sebesar 500%. Dari target sebanyak 2% tahun 2018 tercapai 10%.

IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan :

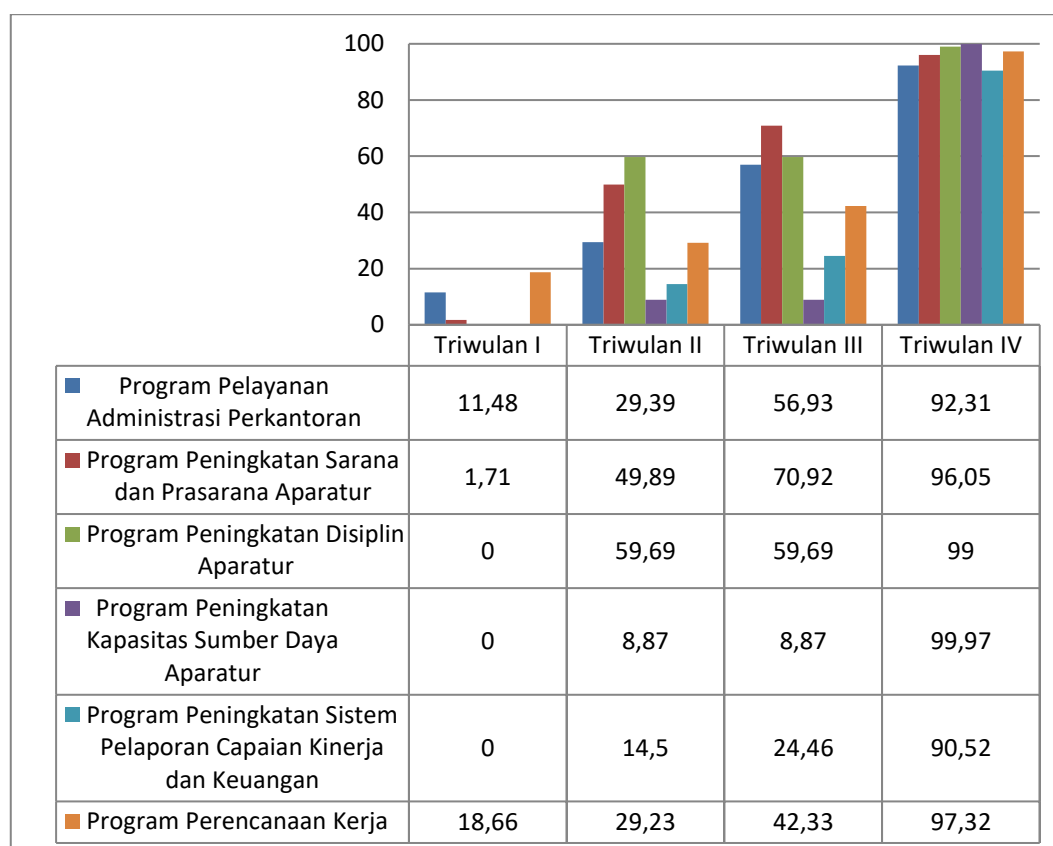
- 1) Indikator ekspor bersih perdagangan, menurut Data Laporan Realisasi Ekspor Berdasarkan SKA Kota Tasikmalaya yang diterima dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2018 nilai ekspor bersih yang berasal dari Kota Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 490.482.708.716,61. Hal ini berarti tingkat capaian target sebesar 90,49%.

A. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Berikut disajikan perkembangan daya serap anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 menurut program pada setiap triwulan :

Grafik 3.1 Perkembangan Daya Serap Anggaran Belanja Langsung Non Urusan Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya Menurut Triwulan



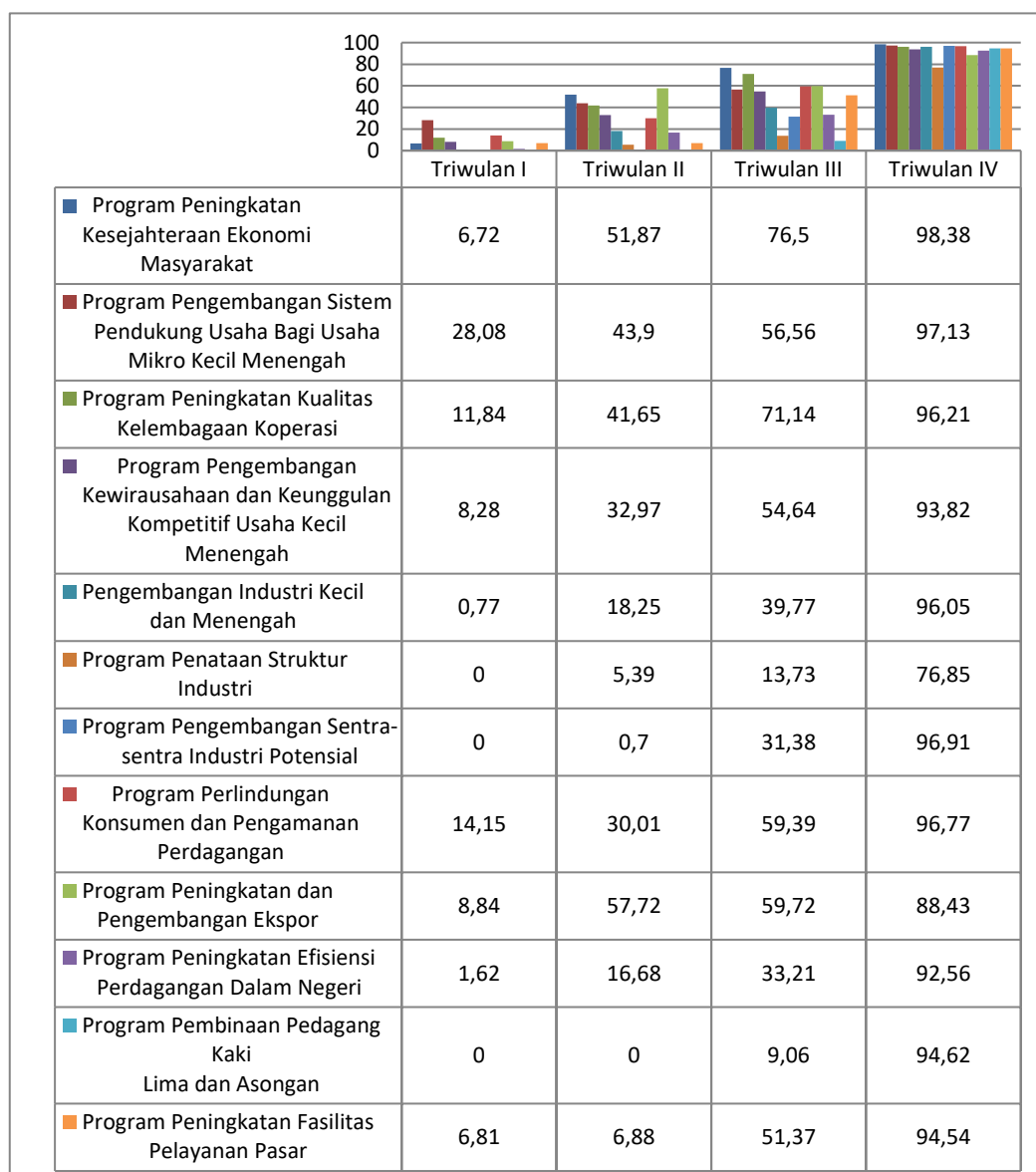
Dari grafik 3.1 di atas terlihat daya serap anggaran Belanja Langsung Non Urusan Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa, realisasi dari Triwulan I hingga Triwulan IV perkembangannya cukup signifikan, tetapi pada Triwulan IV (akhir periode perencanaan) daya serap tidak mencapai 100%.

Enam program pada Belanja Langsung Non Urusan rata-rata memiliki tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 95,86%, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 92,31% yaitu Rp.1.114.099.006,- dari Rp.1.206.872.000,-;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar 96,05% yaitu Rp. 1.141.942.540,- dari Rp.1.188.901.700,-;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar 99% yaitu Rp.37.897.200,- dari Rp.38.280.000,-;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% yaitu Rp.128.160.000,- dari Rp.128.160.000,-;
- Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 90,53% yaitu Rp.23.004.100,- dari Rp.25.412.000,-;
- Program Perencanaan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 99% yaitu Rp. 173.847.700,-dari Rp. 178.640.000,-

Grafik 3.2 Perkembangan Daya Serap Anggaran Belanja Langsung Wajib/ Pilihan Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya Menurut Triwulan



Dilihat dari grafik 3.2 di atas, perkembangan tingkat capaian realisasi anggaran Belanja Langsung Wajib/ Pilihan Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV yang terdiri dari 12 (dua belas) program memiliki tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 93.52% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, dengan realisasi anggaran sebesar 98,38%, yaitu Rp.2.406.126.201,- dari Rp.2.445.783.000,-
- 2) program yaitu Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan realisasi anggaran sebesar 97,13% yaitu Rp.325.397.671,- dari Rp.335.000.000,-
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan realisasi anggaran sebesar 96.61% yaitu Rp.394.453.511,- dari Rp.410.000.000,-
- 4) program yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan realisasi anggaran sebesar 93,82% yaitu Rp.1.745.128.322,- dari Rp.1.860.000.000,-
- 5) Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi anggaran sebesar 96.05 yaitu Rp.2.306.933.229,- dari Rp. 2.401.750.000,-
- 6) Program Penataan Struktru industri, dengan realisasi anggaran sebesar 76,85 % yaitu Rp. 76.853.100,- dari Rp. 100.000.000,-
- 7) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan realisasi anggaran sebesar 96,91% yaitu Rp. 6.856280.500,- dari Rp. 7.075.000.000,-
- 8) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan realisasi anggaran sebesar 96,77% yaitu Rp.643.299.960- dari Rp.664.763.300,-
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan realisasi anggaran sebesar 88,43% yaitu Rp.44.214.650- dari Rp.50.000.000,-
- 10) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan realisasi anggaran sebesar 92,56% yaitu Rp.1.852.069.800- dari Rp.2.001.000.000,-
- 11) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan realisasi anggaran sebesar 94,62% yaitu Rp.94.618.874 dari Rp. 100.000.000,-
- 12) Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar dengan realisasi anggaran sebesar 94,54% yaitu Rp.3.874.697.000,- dari Rp.3.663.225.300,-

Jadi secara keseluruhan Belanja Langsung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, tingkat capaian

realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV mencapai 94,21% yaitu Rp.12.178.555.453,- dari total Rp.13.066.134.600,-. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung total realisasi anggaran sebesar Rp.5.375.952.082,- dari pagu sebesar Rp. 5.497.876.512,- atau 97,78%.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya disajikan tinjauan umum sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai oleh APBD Kota Tasikmalaya maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), umumnya berjalan lancar dan sesuai rencana, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.
2. Khusus aspek keuangan, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.1.071.585.425,- karena rencana anggaran Rp.30.358.661.247,- lebih besar daripada realisasi Rp.29.287.075.822,- atau sebesar 96,47%. Dari 19 Program dan 81 Kegiatan, sebagian besar prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan tidak terhambat/terganggu. Namun demikian capaian realisasi keuangan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 realisasi mencapai 93,21% dan di Tahun 2018 mencapai 96,47%.
3. Terjadinya selisih anggaran di atas yaitu disebabkan oleh sulitnya memprediksi/ mengantisipasi secara tepat kebutuhan anggaran untuk tahun yang akan datang dan fluktuasi harga/ perbedaan harga pada saat penyusunan kebutuhan anggaran dengan harga pada saat realisasi. Penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mengestimasi kemungkinan terburuk untuk meminimalisir resiko gagal lelang/ tidak terlaksananya kegiatan pengadaan tersebut jika menganggarkan di bawah harga pasaran.
4. Untuk realisasi pendapatan secara keseluruhan mencapai 100% yang berasal dari kontribusi Pasar Modern. Untuk Tahun 2018 sumber pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya hanya bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah yaitu sumbangan dari pihak ketiga dalam hal ini pasar modern. Retribusi pasar tradisional bukan lagi kewenangan Dinas Koperasi UMKM Perindag karena pengelolaan pasar tradisional dilimpahkan kepada PD Pasar Resik sesuai dengan Perda Kota Tasikmalaya No 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota

Tasikmalaya. Pelimpahan penanganan pasar tradisional dari Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ke PD Pasar Resik pada tanggal 6 Juni 2011.

5. Meskipun secara umum kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2018 berjalan lancar dan sesuai rencana. Namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang dapat mengganggu aktivitas kinerja, meliputi aspek: sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana.

B. Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam rangka pencapaian visi Kota Tasikmalaya, yaitu :

“ **KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS MAJU DAN MADANI**”, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi :

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya masih kekurangan pegawai, baik untuk pelaksana maupun jabatan fungsional, sampai saat ini hanya 8 (delapan) orang dari perindustrian dan 6 (enam) orang dari perdagangan, sementara kebutuhan tenaga penyuluh adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibutuhkan untuk Penyuluh Koperasi, Perindustrian, PPNS WDP, PPNS Perlindungan Konsumen. Selain itu kemampuan/kompetensi pegawai yang ada masih kurang memadai, sehingga masalah teknis koperasi, industri dan UMKM serta perdagangan yang dihadapi oleh dunia usaha belum sepenuhnya dapat ditangani dengan baik.

b. Aspek Anggaran

Anggaran Dinas Koperasi, Usaha mikro kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya untuk Tahun 2018 masih dirasa kurang terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan langsung pada dunia usaha dan pelayanan publik. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pembinaan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari belum sepenuhnya memadai, oleh karena itu masih harus lebih ditingkatkan lagi pada tahun anggaran yang akan datang.

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, maka harus diupayakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, meliputi :

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap pegawai, seperti :

- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai bidangnya.
- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (penyuluh perindustrian, PPNS WDP, PPNS perlindungan konsumen).

b. Aspek Anggaran

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya serta memperhatikan potensi dan kondisi yang ada, maka diperlukan anggaran yang memadai terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan langsung pada dunia usaha dan pelayanan publik baik itu yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat maupun dari APBN.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas sehari-hari perlu segera ditambah, seperti pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor baru, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan komputer, printer, dan peralatan kantor lainnya.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini disusun dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kami sadar bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf dan bersedia menerima semua kritik maupun saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Disamping itu tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.